

## 150 Anggota PPK Harus Netral

Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari yang hadir pada kesempatan tersebut, meminta semua anggota PPK yang telah diamanahkan untuk menjadi bagian dari penyelenggara pada pilkada 2020 nanti, bertugas sesuai aturan dan menjaga integritas. "Saya harap PPK bertugas sesuai on the track. Jangan serong kanan serong kiri," ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Ikmal Maulana mengatakan, pasca diumumkannya hasil seleksi wawancara, KPU Karawang memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang diumumkan. Selama proses tanggapan masyarakat yang telah dijadwalkan sebelum pelantikan, tidak ada masukan atau bentuk protes dari masyarakat ataupun dari para

calon anggota PPK yang tidak terpilih. "Tidak ada. Semuanya aman," kata Ikmal.

Ikmal menuturkan, sejak dilantik Sabtu (29/2), anggota PPK di masing-masing kecamatan sudah resmi bertugas sebagai penyelenggara. Tugas dalam waktu dekat ialah perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Meski perekrutan PPS langsung oleh KPU, namun PPK dilibatkan dalam proses wawancara para calon PPS.

"Wawancara calon anggota PPS dan pembentukan sekretariat," ujarnya.

Komisioner KPU Jawa Barat Idham Holik mengatakan, yang harus menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan pilkada 2020 di Karawang, ialah pemahaman para anggota PPK mengenai regulasi yang menjadi pedoman dalam melakukan semua tahapan. "PPK harus memahami regulasi

sehingga bisa bekerja berdasarkan peraturan dan menjaga integritas. Harus bekerja on the track," katanya.

Ketua KPU Karawang Miftah Farid mengatakan, kaitan dengan pemahaman para anggota PPK di setiap kecamatan, menurutnya tidak menjadi persoalan. Sebab pada saat perekrutan sudah melalui beberapa tahap seleksi dan pengesanan. "Saya rasa untuk pemahaman sudah ada beberapa tahapan tes termasuk kemampuan dan wawasan kepemiluan. Yang lulus dan dilantik ini secara wawasan cukup baik," jelasnya.

Namun demikian, tambah dia, KPU Kabupaten Karawang tentu kedepan akan memperdalam beberapa regulasi tertentu bagi para anggota PPK. "Kamipun di kabupaten akan memperdalam itu. Untuk anggota PPK pasti ada bimtek," tambahnya. (nce)